

BUTUH KOLABORASI PEMERINTAH-SWASTA

# Akses Pendidikan Anak, Prioritas Penting

**JAKARTA (KR)** - Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dr Huriy Danu Ismadi MPd mengatakan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas penting Pemerintah. Karena itu pihaknya sangat menghargai inisiatif pihak swasta yang menaruh perhatian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), yang menjadi landasan dari semua jenjang pendidikan selanjutnya sampai Perguruan Tinggi.

"Dengan semakin kita bisa memfasilitasi dan memberikan proses pembelajaran yang baik kepada anak-anak usia dini dan SD, akan semakin mempersiapkan mereka dalam mengeksplorasi semua potensi serta memberikan harapan generasi maju di masa mendatang," kata Huriy Danu pada peluncuran Program Rumah Belajar Generasi Maju dan Kelas Generasi Maju kerja sama SGM Eksplor, Alfamart dan Ruangguru secara daring di Jakarta, Selasa (6/4).

Menurut Huriy, kedua program itu mendukung upaya meningkatkan akses pendidikan di Indonesia agar kualitasnya semakin baik, sebagai bentuk kolaborasi Pemerintah dan swasta.

CEO of Danone Specialized Nutrition Indonesia Connie Ang mengatakan, menghadapi tantangan dunia pendidikan saat ini, anak yang kesulitan mendapatkan akses terhadap fasilitas pendukung seperti gawai dengan fitur yang memadai untuk pembelajaran daring, akan berpotensi kehilangan kesempatan belajar yang seharusnya mereka dapatkan dalam situasi normal.

Untuk mendukung upaya Pemerintah mengoptimalkan sistem belajar di rumah, berbagai pihak perlu bersatu untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas internet dalam bentuk kuota belajar, fasilitas belajar seperti gawai, materi pembelajaran berkualitas dan sebagainya.

"Program Rumah Belajar Generasi

Maju dan Kelas Generasi Maju diwujudkan melalui bantuan renovasi Rumah Belajar Generasi Maju KB Mulyosari Bantul, Yogyakarta dan sekolah di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur serta paket dukungan belajar untuk 1.000 siswa kurang mampu Kelas 4-6 SD di berbagai daerah," katanya.

Co-Founder dan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara meyakini, peningkatan kualitas pendidikan yang merata, diharapkan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh. Karena itu, sebagai startup pendidikan, Ruangguru menyambut baik program ini, yang diharapkan dapat mengoptimalkan sistem belajar di rumah anak, terutama selama masa pandemi.

Menurut Presdir PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Anggara Hans Prawira, melalui rehabilitasi infrastruktur pendidikan, diharapkan dapat mendukung penyediaan akses pendidikan yang layak bagi anak Indonesia. **(San)-f**

**Biaya** . . . . . tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Ia menyatakan, kenaikan sebesar Rp 9,1 juta per orang itu berdasarkan komponen-komponen yang mesti disesuaikan saat masa pandemi.

Sekitar Rp 6,6 juta untuk penerapan protokol kesehatan, Rp 1,4 juta untuk kenaikan kurs dan Rp 1 juta akomodasi seperti hotel dan catering.

"Kami fokusnya di yang kurs dan biaya satuan. Sedangkan, prokes bukan kompetensi kami, meskipun kami menyarankan sebagian sudah dibebankan kepada jemaah sebagian pada APBN, itu akan mengurangi tekanan kepada nilai manfaat dana haji," papar Anggito.

Kondisi berbeda jika menggunakan valuta asing dalam pembiayaan haji, maka kenaikan yang signifikan bisa terhindari, karena pemerintah akan membayarnya dalam bentuk valas. Sementara, jika menggunakan rupiah nilainya fluktuatif seiring dengan kondisi kurs.

**Sambungan hal 1**

"Tetapi kalau kita menyediakan (valas), Alhamdulillah kami telah melakukan mitigasi cukup untuk membiayai, bahkan kita bisa menurunkan BPIH dalam bentuk valas. Jadi mohon ini menjadi pertimbangan dalam pembahasan Panja BPIH," pinta Anggito Abimanyu.

Saat ini, pengelolaan dana haji berada dalam posisi Rp 145 triliun dan nilai manfaatnya mencapai sekitar Rp 8 triliun.

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH, Acep Riana Jayaprawira mengatakan, kenaikan BPIH tidak dibebankan kepada jemaah, tapi akan dikover sepenuhnya oleh distribusi Virtual Account 2020.

"Yaitu Rp 1,7 juta perjemaah untuk lunas tunda jemaah dan sisanya subsidi nilai manfaat tahun berjalan kurang lebih Rp 7,46 juta perjemaah. Sehingga BPIH saldo setoran jemaah sebesar Rp 36,94 juta perjemaah," katanya. **(Ant)-d**

## Dibantu

Dalam mempercepat penyaluran logistik, ungkap Kepala BNPB, pihaknya telah mengerahkan sejumlah helikopter untuk menyalurkan bantuan dan keperluan lainnya.

BNPB bersama Tim Gabungan dari Kementerian Sosial, TNI, dan Polri juga telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik di wilayah terdampak untuk menyalurkan pasokan logistik kepada para pengungsi serta Kemenkes di bidang kesehatan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukan percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan, serta memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat, dalam penanganan bencana di NTT dan NTB.

"Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala

**Sambungan hal 1**

Basarnas, dibantu Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya untuk mengerahkan tambahan personel SAR, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban," kata Presiden.

BNPB merilis jumlah korban jiwa akibat bencana alam di NTT hingga Selasa pukul 15.00 WIB sebanyak 86 orang menurut hasil verifikasi data.

"Jadi, kesepakatan kemarin yang dinyatakan meninggal dunia yang telah ditemukan jenazahnya dan telah verifikasi," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Radiana Jati.

Siklon Seroja di Selatan NTT pada 4 April 2021 menyebabkan angin ken-

cang, tanah longsor, dan banjir bandang di Kota Kupang serta Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembara, Ngada, Alor, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Ende. Bencana alam itu juga menyebabkan 98 orang hilang dan 146 orang terluka serta berdampak terhadap 2.683 warga.

Sebanyak 1.992 rumah warga terdampak, dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan ringan 109 unit, rusak sedang 133 unit, dan rusak berat 498 unit. Sebanyak 84 fasilitas umum juga terdampak.

Menteri Sosial Tri Rismaharani meninjau lokasi bencana banjir bandang di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Mensos antara lain mengunjungi posko bencana alam untuk meninjau dapur umum yang disiapkan Pemkab setempat. **(Sim/Ati/Ful)-d**

## Sang 'Mahaguru'

**Sambungan hal 1**

'Presiden Malioboro'. Predikat itu disematkan pelukis Hardi di forum pertemuan sastrawan Indonesia di TMII Jakarta pada tahun 1970-an. Sewaktu Umbu memperkenalkan diri, Hardi berteriak dengan lantang: "Ini dia Presiden Malioboro".

Sebenarnya, Umbu merasa kurang sreg dengan sebutan 'Presiden Malioboro' itu. Dirinya lebih senang dijuluki sebagai 'Lurah Malioboro' - suatu predikat yang lama sebelumnya telah melekat erat di Yogyakarta.

Emha menggaris-bawahi predikat yang disematkan Hardi itu, dengan menyebutnya sebagai 'Mr President'. Predikat tersebut bermula dari esai Emha di MIM Tempo. Umbu pun mengaku kikuk ketika seorang bos hotel di Denpasar Bali memanggilmnya dengan sebutan yang 'dianugerahkan' Emha tersebut. Meninggalkan Yogya tahun 1975, Umbu kemudian menetap di Bali. Ia mendapat kepercayaan dari pengelola SKH Bali Post untuk mengasuh rubrik sastra seperti yang pernah dilakukannya di mingguan Pelopor Yogya. Nalurnya sebagai sang 'mahaguru' berhasil pula mencetak sejumlah penyair muda di pulau Dewata.

Cerita lain tentang Umbu adalah dirinya pernah bertemu dan berbicara langsung dengan Presiden Soeharto, saat menjelang peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Pak Harto melakukan pertemuan dengan perwakilan ma-

**Sambungan hal 1**

hasiswa se-Indonesia.

Merasa menjadi perwakilan mahasiswa asal Yogya, Umbu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ketika Presiden Soeharto bertanya, "Adakah wakil mahasiswa dari Yogya?"

Sementara itu, Kantor Berita Antara memberitakan, penyair Umbu Wulang Landu Paranggi, meninggal dunia diduga karena terserang Covid-19. Menurut penyair Wayan Jengki Sunarta, Umbu Landu menjalani perawatan di rumah sakit sejak Sabtu malam. "Pak Umbu kritis sejak tadi malam dan wafat Selasa dini hari pukul 03.55 WITA," kata Jengki.

Jengki menuturkan, Sabtu (3/4) sekitar pukul 19.00 WITA, Umbu diantar ke rumah sakit oleh beberapa pegiat sastra, yang kemudian menunggui dan memantau kondisi Umbu di rumah sakit. "Kami semua merasa sangat kehilangan dengan kepergian Beliau. Indonesia tentu juga kehilangan salah satu putra terbaiknya di bidang sastra," kata Jengki.

Menurut Jengki, Umbu menetap di Bali sejak tahun 1979. Jengki mengenangnya sebagai penyair yang selalu punya cara unik untuk membangkitkan gairah apresiasi sastra. "Bagi Umbu, puisi adalah kehidupan dan kehidupan adalah puisi. Penyair Bali generasi 1980-an, 1990-an dan 2000-an rata-rata pernah beresekan dengan vibrasi Umbu," katanya. Selamat jalan Mr President... **(No/Obi)-f**

## Larangan

sejumlah persyaratan bagi calon penumpang antarkota atau jarak jauh.

"Kami mengatur dengan cara skrining untuk memastikan orang yang betul-betul sehat, atau tidak berpotensi menularkan itu yang bisa menggunakan transportasi umum," katanya.

Meski demikian, menurut Adita, kebijakan struktural melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak akan berjalan efektif di lapangan, jika tidak ada kolaborasi antarpemangku kepentingan. "Kami juga perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur yang mendorong pendekatan persuasif, melalui imbauan, edukasi, juga sosialisasi tentang perlunya membatasi pergerakan," katanya.

**Sambungan hal 1**

Kemenhub, kata Adita, saat ini tengah menyusun ketentuan teknis terkait pengendalian transportasi pada Idul Fitri 2021, termasuk mempertimbangkan sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik.

"Pengendalian ini nanti kita tetapkan aturannya, kita sosialisasikan juga agar masyarakat dibuat paham apa konsekuensinya jika tetap melakukan mudik. Ada yang tidak berbasis hukum, tetapi ada juga yang berbasis hukum atau berupa sanksi-sanksi," katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh Kemenhub, setiap libur panjang tercatat lonjakan penumpang, khususnya transportasi umum. Selain itu jumlah kenda-

raan pribadi juga terpantau naik ketika momen liburan.

PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang pesawat sebanyak 105.612 pergerakan orang di 15 bandara pada H-1 Libur Jumat Agung yang jatuh pada Kamis 1 April lalu. Angka tersebut lebih tinggi 39,8 persen dibanding trafik rata-rata harian pada Maret 2021 lalu yang sebesar 75.522 penumpang perhari.

Sementara PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 343.962 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H-1 dan H libur Paskah (3-4 April 2021). Volume lalu lintas (lalin) tersebut naik 23,83 persen. **(Ant)-f**

## Belum

**Sambungan hal 1**

Sementara pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, menurutnya, dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga tercatat lima penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN. Sedang di tingkat pemerintah daerah, ujar Ipi, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Pada kesempatan ini ia juga menegaskan bahwa KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. "Dan kslau hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan," tutur Ipi.

Ia menambahkan, jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN. "Sedang laporan kekayaan yang tidak lengkap akan mengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada instansi maupun secara nasional," kata Ipi.

Mengenai penyampaian LHKPN setelah batas waktu,

**Sambungan hal 1**

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. **(Ful)-d**



Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-31	65-90
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-90
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-90
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	24-31	65-90

## Pesimisme

menggambarkan rumah tangga optimis terhadap perbaikan ekonomi ke depan dan akan meningkatkan pengeluarannya. Kondisi ini terjadi karena belum adanya pandemi Covid-19.

Namun triwulan II - IV (April - Desember) 2020 ketika pandemi telah terjadi menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,51% pada triwulan II, 4,04% pada triwulan III dan 3,61% pada triwulan IV. Data pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut selaras dengan turunnya keyakinan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi ke depan. Hal ini dikonfirmasi indeks keyakinan konsumen yang mencapai 84,8 pada April 2020. Indeks ini berfluktuasi dengan kecenderungan terus menurun hingga mencapai 79,0 pada Oktober 2020 dan meningkat kembali menjadi 96,5 pada Desember 2020.

Angka indeks di bawah 100 tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga merasa pesimis terhadap perbaikan eko-

**Sambungan hal 1**

nomi di masa depan. Pesimisme rumah tangga tersebut terjadi karena adanya berbagai pembatasan yang dialami masyarakat. Akibatnya banyak perusahaan yang tutup atau karyawan dirumahkan. Selain itu banyak juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurunkan daya beli rumah tangga. BPS mengkonfirmasi, telah terjadi lonjakan pengangguran periode Februari - Agustus 2020 dari 4,94% pada Februari 2020 menjadi 7,07% pada Agustus 2020.

Tingkat keyakinan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi tahun 2021 diharapkan telah membaik. Sehingga konsumsi rumah tangga sebagai penopang PDB akan meningkat dan imbasnya melahirkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Mengingat vaksinasi telah dijalankan dan sebagian target vaksinasi telah berhasil dicapai. Diharapkan pandemi segera berakhir.

Namun dalam rilisnya, BI justru menyampaikan data sebaliknya. Indeks keyakinan konsumen makin menurun

raan pribadi juga terpantau naik ketika momen liburan.

PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang pesawat sebanyak 105.612 pergerakan orang di 15 bandara pada H-1 Libur Jumat Agung yang jatuh pada Kamis 1 April lalu. Angka tersebut lebih tinggi 39,8 persen dibanding trafik rata-rata harian pada Maret 2021 lalu yang sebesar 75.522 penumpang perhari.

Sementara PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 343.962 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H-1 dan H libur Paskah (3-4 April 2021). Volume lalu lintas (lalin) tersebut naik 23,83 persen. **(Ant)-f**

**Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA**  
Dosen Prodi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

# Bangkitkan Perekonomian dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

5,07%. Pada Triwulan II 2020 bahkan perubahan ekonomi secara nasional mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -5,32%. Hal tersebut tentu saja membuat berbagai pihak merasa khawatir jika Indonesia tidak dapat bangkit sehingga akan terjadi krisis ekonomi kembali. Laporan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III tahun 2020 perlahan bergerak meninggalkan angka -5,32% yang terjadi pada Triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar -3,49% atau naik sebesar 1,83% dan mengalami kenaikan kembali pada Triwulan IV tahun 2020 yaitu sebesar -2,19 atau naik sebesar 1,3%.

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah efektif pada Triwulan 2020. PEN terdiri atas 3 kebijakan utama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas

dunia usaha (supply) serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari semua lembaga pemerintah maupun swasta, pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu yang harus mendukung kebijakan tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah salah satu sektor yang ikut berkontribusi dalam turunnya perekonomian nasional.

Hal tersebut dikarenakan UMKM mempunyai kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masing-masing 57,2%, 57,1%, 60,3%, 60% dan 61%. Kontribusi ini sangat besar karena lebih dari 50% kontribusi PDB berasal dari UMKM. Menurut data Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 62.992.617, 64.194.057 dan 65.465.487 artinya UMKM di Indonesia mengalami kenaikan yang sama yaitu naik 1.271.440 pada tahun 2018 dan 2019 atau naik 2,02% pada tahun 2018 dan naik 1,98% pada tahun 2019. Hal ini tentu saja menjadi potensi ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang besar dan otomatis mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Hal tersebut juga mampu menjadikan UMKM sebagai tameng dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini. Transaksi UMKM yang cepat menjadikan perputaran transaksi cepat sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi saat ini karena produk UMKM banyak yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah untuk menjadikan

UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional antara lain memberikan subsidi bunga pinjaman, memberikan bantuan modal sebesar Rp 2.400.000, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Semua kebijakan pemerintah ini diberikan agar program PEN yang telah ditetapkan mampu menggerakkan UMKM untuk membangkitkan perekonomian nasional.

Kebijakan pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman memiliki tujuan para UMKM dapat memperkuat modal usahanya melalui kredit yang disalurkan oleh perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMI) yang disalurkan lembaga keuangan bukan bank serta penyaluran dana bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPBD) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain memberikan

subsidi bunga pinjaman, pemerintah juga memberikan bantuan tunai sebesar Rp 2.400.000 untuk setiap UMKM sebagai tambahan modal dengan tujuan agar UMKM dapat tetap produksi di tengah pandemi Covid-19 ini. Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan nasional dengan tujuan restrukturisasi kredit UMKM dengan mengalokasikan dana kurang lebih Rp 78,78 triliun guna meningkatkan likuiditas UMKM.

Likuiditas ini ditujukan agar UMKM mendapatkan fasilitas penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit serta penambahan fasilitas kredit. Selain itu pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja UMKM hingga Rp 10 miliar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan PT. (Persero) Askindo yang telah diatur melalui PMK 71/2020. (\*)